

**PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
KARANGANYAR  
DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR DAN PEDULI PAJAK  
DI KABUPATEN KARANGANYAR DAN KABUPATEN SRAGEN**



**TUGAS AKHIR**

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya

Program studi Diploma III Perpajakan

**Disusun Oleh :**

**Andam Masdika Septya Wardhana**

**F.3407087**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2010**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis yang pernah melanda Indonesia pada era tahun 1997 berdampak sangat buruk terhadap pembangunan Indonesia. Krisis yang terjadi kala itu berdampak buruk bagi bangsa ini dan terus berlanjut dan berubah menjadi krisis moneter dan krisis keuangan. Hal tersebut bermula dari kesalahan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan. Ketergantungan pemerintah pada pinjaman luar negeri dalam membiayai pembangunan berdampak krisis moneter dan segera perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik. Hal itu harus segera dilakukan agar ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dapat dikurangi dan perlahan dihilangkan.

Kebutuhan dana pembangunan yang tidak sedikit perlu segera dipenuhi dengan cara memberdayakan secara maksimal potensi penerimaan Dalam Negeri dari sektor migas dan non migas. Saat ini pajak menjadi penerimaan yang sangat diandalkan oleh pemerintah dari sektor non migas. Pajak merupakan cermin kemandirian suatu bangsa.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan dari sektor pajak dianggarkan semakin besar jumlahnya dari tahun ke tahun. Penerimaan dari sektor pajak selalu meningkat dan melebihi target (*surplus*). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010, belanja negara yang dibiayai dari penerimaan pajak mencapai 71 persen. Tetapi sebaliknya, pembiayaan dari utang luar negeri kian hari kian menyusut. Ini menunjukkan

betapa pentingnya kontribusi perpajakan bagi bangsa Indonesia. Ini pula sebagai indikasi negara ini semakin mandiri, terlihat dari porsi perpajakan yang mencapai 87 persen dari keseluruhan penerimaan negara.

Langkah efektif perlu segera diambil untuk menjaga penerimaan pajak sekaligus sebagai wujud tertib administrasi yang dilakukan oleh aparat/fiskus dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peningkatan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak serta peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan jaminan kepastian hukum sangat diperlukan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Dengan adanya keadilan, kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan diharapkan dapat pula meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dalam peran serta menyukseskan pembangunan nasional.

Undang-undang perpajakan Indonesia saat ini menganut sistem *Self Assesment System* dalam hal pemungutan pajak sebagai pengganti dari *Official Assesment System*. Sistem *Self Assesment* dianut Indonesia sejak terjadi reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983. Dengan sistem ini, Wajib Pajak diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan dan menumbuhkembangkan reformasi perpajakan, tentunya diperlukan waktu dan upaya-upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Dan tentunya juga harus menyesuaikan pola pikir dan penilaian masyarakat mengenai pajak. Upaya yang dominan telah dilakukan pemerintah antara lain yaitu melakukan

pendekatan dengan masyarakat dengan memberikan informasi melalui penyuluhan, penataran, komunikasi, seminar administrasi, peningkatan mutu pelayanan dan pengawasan.

Adanya suatu perundang-undangan tentang perpajakan yaitu diwajibkan agar masyarakat atau Wajib Pajak berinisiatif untuk mengetahui dan melaksanakan isi dari peraturan tersebut. Tetapi pada kondisi secara umum masyarakat masih enggan dan malas untuk mempelajari peraturan tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap sistem *Self Assessment*, yaitu sistem ini akan menjadi tidak efektif. Kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung jumlah pajak dan melaporkannya secara tidak lengkap masih sangat besar.

Oleh karena itu *Self Assessment System* memerlukan pengetahuan, ketelitian, dan kejujuran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maksud dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak, sehingga jumlah Wajib Pajak dan jumlah penerimaan pajak pada akhirnya nanti akan terus meningkat. Dalam hal ini peranan dan kontribusi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sangat diperlukan untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak, khususnya masyarakat di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak agar penerimaan dari sektor pajak bisa terus meningkat. Oleh karena itu penulis menyusun Tugas Akhir yang berjudul “PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK

PRATAMA KARANGANYAR DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SADAR DAN PEDULI PAJAK DI KABUPATEN KARANGANYAR DAN KABUPATEN SRAGEN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini ingin merumuskan beberapa permasalahan yang dapat diambil dalam mengetahui peranan KPP Pratama Karanganyar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak antara lain:

1. Bagaimanakah peran KPP Pratama Karanganyar dalam mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen khususnya pada tahun 2007-2009?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Karanganyar dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen?
3. Apa saja usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Karanganyar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui peranan KPP Pratama Karanganyar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Karanganyar dalam peranannya mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
3. Mengetahui usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Karanganyar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi KPP Pratama Karanganyar  
Merupakan sumbangan pikiran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
2. Bagi Peneliti  
Menambah pengetahuan dan memberikan informasi tentang usaha dan peran KPP Pratama Karanganyar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
3. Bagi Pihak Lain  
Dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai perpajakan dan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Objek Penelitian  
Objek penelitian untuk penulisan tugas akhir ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi atau objek penelitian. Data ini meliputi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang berisi sejarah, lokasi, dan struktur organisasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh penulis, melainkan sudah ada data jadi yang disediakan oleh instansi atau pihak yang bersangkutan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Observasi

Melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

### b. Metode Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan karyawan KPP Pratama Karanganyar.

### c. Metode Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan data, laporan dan tulisan dari KPP Pratama Karanganyar yang mendukung teori dan penelitian.

### d. Metode Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan tugas akhir.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I     PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

### **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka literatur yang relevan dengan masalah yang hendak dibahas.

### **BAB III   PEMBAHASAN**

Berisi gambaran umum perusahaan, laporan magang kerja, menganalisis data dan fakta hasil penelitian serta mengidentifikasi masalah yang ada di KPP Pratama Karanganyar.

### **BAB IV   PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran dari penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo,2008)

Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Dapat dipaksakan dalam arti bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan, sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

## **2. Ciri-Ciri Yang Melekat Pada Pengertian Pajak**

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Suandy, 2000:11):

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* .
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah .
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

## **3. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

**4. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2008:2):

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya ialah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **5. Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
- b. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
  - 1) Hukum Tata Negara
  - 2) Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  - 3) Hukum Pajak
  - 4) Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. (Mardiasmo, 2008: 4)

Hukum Pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain. (Mardiasmo, 2008: 4)

## **6. Pengelompokan Pajak**

### **a. Menurut golongannya**

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : PPnBM

c. Menurut lembaga pemungutnya

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

## 7. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). (Mardiasmo, 2008: 6)

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. (Mardiasmo, 2008: 6)

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika

lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. (Mardiasmo, 2008: 6)

## **8. Yurisdiksi Pemungutan Pajak**

Yurisdiksi pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan kebangsaan atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh. Yurisdiksi yang dimaksud ialah batas kewenangan yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar pemungutannya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan orang yang dikenakan pajak. (Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, 2001: 15)

### **a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. (Mardiasmo, 2008: 7)

### **b. Asas Sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2008: 7)

### **c. Asas Kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang



mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. (Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, 2001: 15)

## **9. Sistem Pemungutan Pajak**

### **a. *Official Assessment System***

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### **b. *Self Assessment System***

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 2) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

- 3) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **10. Pengertian Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Mardiasmo, 2008: 21)

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. (Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Wajib Pajak adalah pihak yang dilayani institusi Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk kepentingan negara dan dapat menentukan tingkat pelayanan publik

yang diberikan oleh institusi Direktorat Jenderal Pajak. (DJP, Buku Panduan Pelayanan)

Hak-hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak:

- a. Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Mengajukan penundaan pembayaran atau mengangsur utang pajak yang telah jatuh tempo.
- c. Meminta perpanjangan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
- d. Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan.
- e. Mengajukan keberatan dan banding.

Kewajiban yang harus dipenuhi setiap Wajib Pajak (WP):

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), terutama yang berpenghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi pengusaha.
- b. Melunasi semua utang pajaknya.
- c. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- d. Untuk Wajib Pajak Badan diwajibkan melakukan pembukuan dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas maupun Wajib Pajak Orang Pribadi

yang melakukan pekerjaan bebas yang diijinkan melakukan pencatatan.

- e. Memberikan bukti-bukti yang diminta petugas pajak ketika dilakukan pemeriksaan.

## **11. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **a. Fungsi Surat Pemberitahuan**

- 1) Bagi WP, SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- 2) Bagi pengusaha Kena Pajak, SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.

### **b. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT meliputi:

- SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- SPT Masa yang terdiri dari:
  - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan
  - 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
  - 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

SPT dapat berbentuk:

- Formulir kertas (hardcopy); atau
- e-SPT

c. Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan

WP sebagaimana harus mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Tempat pengambilan SPT adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak
- 2) Kantor Penyuluhan Pajak
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
- 4) Kantor Wilayah Dirjen Pajak
- 5) Kantor Pusat Dirjen Pajak
- 6) Melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau homepage Dirjen Pajak, yaitu: <http://www.pajak.go.id>
- 7) Mencetak/ menggandakan/ fotokopi sendiri dengan bentuk isi yang sama dengan aslinya.

d. Penyampaian Surat Pemberitahuan

Penyampaian dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Menyampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak.
- 2) Melalui kantor pos.
- 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

e. Surat Pemberitahuan Tidak Lengkap Apabila

- 1) Nama dan NPWP tidak dicantumkan dalam SPT
- 2) Elemen SPT induk dan lampiran kurang/ tidak diisi lengkap.
- 3) SPT tidak ditandatangani WP atau ditandatangani kuasa WP, tetapi tidak dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus.
- 4) SPT tidak atau kurang dilampiri yang disyaratkan
- 5) SPT kurang bayar tetapi tidak dilampiri dengan surat setoran pajak.

f. Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa :

- 1) PPh pasal 21, 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- 2) PPh pasal 23 dan 26, 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- 3) PPh pasal 25, 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- 4) PPh pasal 22, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor, 14 hari setelah masa pajak berakhir.
- 5) PPh pasal 22, PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh Dirjen bea dan Cukai.

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan :

- SPT tahunan PPh, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
- SPT tahunan PPh pasal 21, 3 bulan setelah berakhirnya pajak tahunan.

g. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atas batas waktu perpanjangan penyampaian SPT dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- 1) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
- 2) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
- 3) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
- 4) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

## **12. Pengertian Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak**

Masyarakat sadar pajak ialah sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan sadar tentang hak untuk menerima pelayanan publik yang dibiayai dari pajak. Sedangkan Peduli terhadap pajak ialah kelanjutan dari sikap sadar masyarakat akan kewajibannya di bidang perpajakan dan dibuktikan dengan kesediaan untuk membayar pajak. Dari kedua asumsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat

sadar dan peduli pajak adalah masyarakat yang sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta membayar pajak sebagai perwujudan kepedulian sebagai warga negara yang patuh terhadap kebijakan pemerintah.

### **13. Tujuan Program Mewujudkan Masyarakat Sadar Pajak**

Tujuan diadakannya program perwujudan masyarakat sadar dan peduli pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk memenuhi target 70% pada penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu juga untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) guna mendorong kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional yang pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak yang mulai diterapkan pada tahun 2007, salah satunya dengan modernisasi KPP yang hingga saat ini telah mencapai kemajuan yang signifikan. Hampir semua KPP di Jawa saat ini telah menjadi KPP modern, dan hampir semua kabupaten telah memiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal Dirjen Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dan selanjutnya untuk KPP Pratama Karanganyar bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah II.

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan subjek dan objek pajak, serta penilaian objek PBB.
- Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
- Penyuluhan perpajakan.
- Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- Pelaksanaan ekstensifikasi.
- Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- Pelaksanaan intensifikasi.
- Pembetulan ketetapan pajak.
- Pengurangan PBB serta BPHTB.
- Pelaksanaan administrasi kantor.

## **Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar**

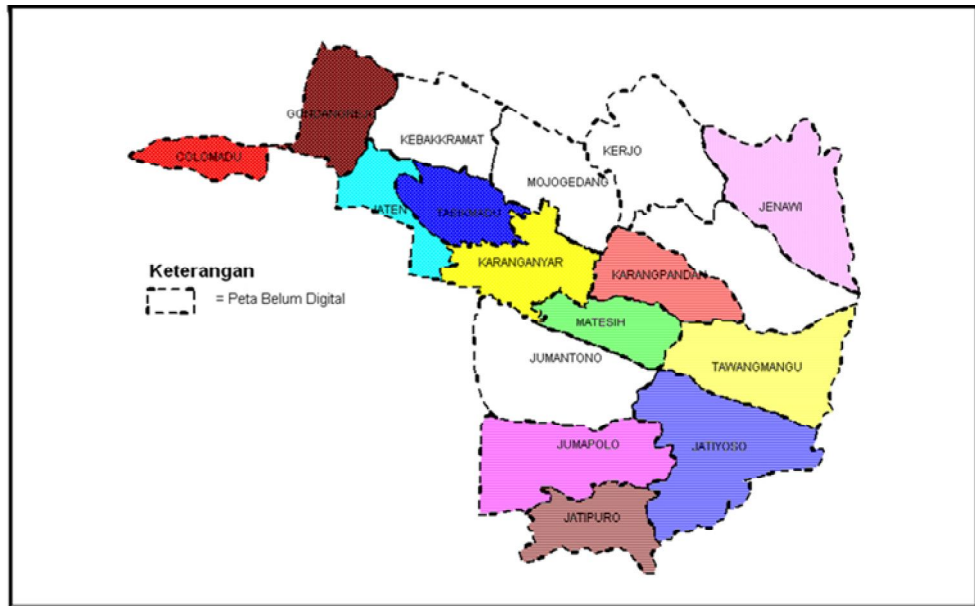
### **1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar**

KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Pratama Surakarta. Seiring dengan adanya modernisasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Karanganyar bisa berdiri sendiri. Awal berdirinya KPP Pratama Karanganyar masih menggunakan

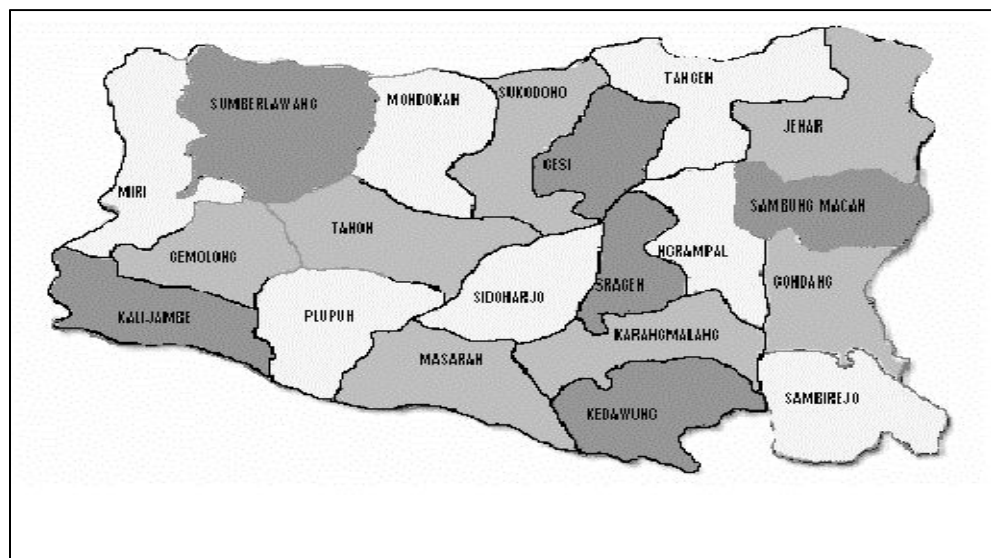
ex Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Surakarta. Pada bulan Januari 2007 kantor tersebut digunakan sebagai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II. Oleh karena itu kegiatan operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke ex kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada akhir bulan Desember 2007 tanpa perencanaan yang matang KPP Pratama Karanganyar pindah ke Gedung Megaria Jalan Raya Palur karena banjir bandang akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo yang mengakibatkan sebagian besar dokumen hanyut terbawa banjir. Sejak pindah ke Gedung Megaria, sarana dan prasarana masih belum lengkap dan seringkali Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tidak bisa *online* sehingga harus menggunakan sarana-sarana manual.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan: Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Instansi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kode wilayah KPP Pratama Karanganyar di NPWP yang sebelumnya 526 (KPP Pratama Surakarta) menjadi 528 (KPP Pratama Karanganyar). Wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi 2 kabupaten, yaitu:

- Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 kecamatan.
- Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan.



Gambar III.1  
Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar – Kabupaten Karanganyar



Gambar III.2  
Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar – Kabupaten Sragen

## **2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak**

### **a. Visi Direktorat Jenderal Pajak**

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

### **b. Misi Direktorat Jenderal Pajak**

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

## **3. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar**

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dirjen Pajak dalam Pasal 60, Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar dapat dilihat dalam gambar III.3 Berikut ini :



#### **4. Deskripsi Masing-Masing Jabatan**

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas mengkoordinasi dan Mengendalikan kegiatan operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu:

1) Bagian Kepegawaian

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menata usahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, penataan/penyusunan arsip dan dokumen serta membantu urusan lapangan.

2) Bagian Keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan Kegiatan dan memproses surat permintaan pembayaran.

3) Bagian Rumah Tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta penyiapan laporan kinerja.

e. Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif (Surat Tagihan dan Lelang) terhadap tunggakan yang jatuh tempo, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak,



pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan mendistribusikan ke Seksi Fungsional, administrasi perpajakan lainnya, menyusun laporan/ surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pemeriksaan serta mengadministrasikan berkas laporan hasil pemeriksaan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I)

Tugas yang dilaksanakan oleh tiap Waskon ialah sama, hanya saja tiap Waskon membawahi daerah/ kecamatan yang berbeda-beda. Seksi Waskon mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan PBB serta BPHTB dan melakukan evaluasi hasil banding.

Seksi Waskon I membawahi 14 kecamatan, antara lain:

- 1) Kecamatan Karangpandan
- 2) Kecamatan Karanganyar

- 3) Kecamatan Kebakramat
- 4) Kecamatan Tasikmadu
- 5) Kecamatan Mojogedang
- 6) Kecamatan Sidoharjo
- 7) Kecamatan Tangen
- 8) Kecamatan Gemolong
- 9) Kecamatan Mondokan
- 10) Kecamatan Sumberlawang
- 11) Kecamatan Tanon
- 12) Kecamatan Kalijambe
- 13) Kecamatan Masaran
- 14) Kecamatan Sambung Macan

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II)

Seksi Waskon II membawahi 9 kecamatan, antara lain:

- 1) Kecamatan Jaten
- 2) Kecamatan Matesih
- 3) Kecamatan Jatipuro
- 4) Kecamatan Gondang
- 5) Kecamatan Jenar
- 6) Kecamatan Sukodono
- 7) Kecamatan Kedawung
- 8) Kecamatan Sragen
- 9) Kecamatan Tawang Mangu

j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III)

Seksi Waskon III membawahi 13 kecamatan, antara lain:

- 1) Kecamatan Colomadu
- 2) Kecamatan Gondangrejo
- 3) Kecamatan Kerjo
- 4) Kecamatan Jatiyoso
- 5) Kecamatan Jumantono
- 6) Kecamatan Plupuh
- 7) Kecamatan Sambirejo
- 8) Kecamatan Ngrampal
- 9) Kecamatan Ngargoyoso
- 10) Kecamatan Karang Malang
- 11) Kecamatan Jumapolo
- 12) Kecamatan Miri
- 13) Kecamatan Gesi

k. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

KP2KP adalah instansi vertikal Dirjen Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu KPP Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut KP2KP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat.
- 2) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 3) Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
- 4) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu KPP Pratama.
- 5) Pelaksanaan administrasi kantor.

KP2KP terdiri dari petugas tata usaha dan kelompok jabatan fungsional yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Petugas Tata Usaha

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1. Fungsional Pemeriksa

Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas menyampaikan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan, dan melakukan penilaian terhadap objek pajak di lapangan.

## **5. Tujuan Didirikan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Lokasi KPP Pratama Karanganyar**

### **a. Tujuan Didirikannya KPP Pratama Karanganyar**

Tujuan didirikannya KPP Pratama Karanganyar antara lain:

- 1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak.
- 2) Untuk menggali potensi fiskal dan meningkatkan penerimaan pajak.
- 3) Untuk memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
- 4) Untuk memberikan penilaian pembinaan Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan penyuluhan pengetahuan tentang perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung.
- 5) Untuk menunjang perkembangan dan mempercepat terwujudnya pendapatan Wajib Pajak, khususnya di wilayah atau daerah wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

### **b. Tugas Pokok KPP Pratama Karanganyar**

Tugas pokok KPP Pratama Karanganyar yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

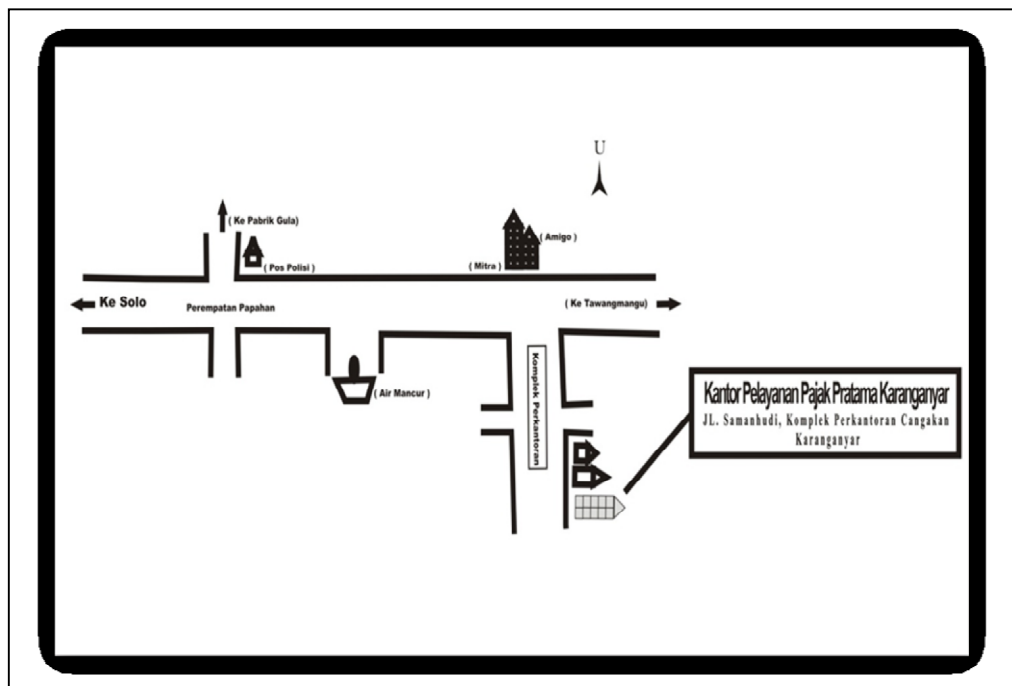
**c. Fungsi KPP Pratama Karanganyar**

Fungsi KPP Pratama Karanganyar yaitu:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 2) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa, serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- 4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- 5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- 6) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 7) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 8) Pengurangan sanksi pajak.
- 9) Penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak.
- 10) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

**d. Lokasi KPP Pratama Karanganyar**

KPP Pratama Karanganyar yang semula berada satu gedung dengan KPP Pratama Surakarta, dan sempat berpindah sebanyak tiga kali yaitu ke ex Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Surakarta, ex Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dan terakhir ke Gedung Megaria Jalan Raya Palur. Saat ini KPP Pratama Karanganyar telah berpindah dan menetap di kantor baru yang berlokasi di Jalan KH. Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangkakan, Karanganyar.



Gambar III.4  
Denah Lokasi KPP Pratama Karanganyar

## B. Laporan Magang Kerja

### 1) Jadwal Magang

Kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan hari Rabu tanggal 31 Maret 2010. Kegiatan magang dimulai pada pukul 07.30 WIB s/d 15.00 WIB setiap harinya. Magang dilakukan seperti layaknya pegawai kantor yaitu lima hari kerja setiap minggunya dimulai hari Senin sampai dengan Jum'at. Untuk keterangan lebih lengkap mengenai jadwal magang, bisa dilihat pada tabel yang ditampilkan dan telah terlampir pada Laporan Presensi Harian Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa (KMM).

**Tabel III.1**  
**Jadwal Kegiatan Magang Mahasiswa di**  
**KPP Pratama Karanganyar**

<b>Kegiatan Magang Dimulai Pada: 1 Februari 2010 s/d 31 Maret 2010</b>				
<b>Hari Kerja</b>	<b>Datang</b>	<b>Istirahat</b>	<b>Pulang</b>	<b>Pakaian</b>
Senin	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Atas Kemeja Putih dan Bawah Celana Bahan Hitam
Selasa	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Atas Kemeja Bebas Dan Bawah Celana Bahan
Rabu	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Atas Kemeja Bebas Dan Bawah Celana Bahan
Kamis	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Atas Kemeja Bebas Dan Bawah Celana Bahan
Jumat	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Atas Batik dan Bawah Celana Bahan

*Sumber: Data diolah*



## 2) Aktivitas Magang

Lokasi Magang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Selama proses kegiatan magang, penulis bertugas pada divisi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Selama bertugas pada divisi ini, tugas yang penulis laksanakan ialah melakukan perekaman SPT Masa dan perekaman tanda terima Drop Box. Selain tugas tersebut, sesekali penulis bertugas melakukan sortir rekapan penerimaan SPT. Perekaman SPT Masa dilakukan dengan cara mengentry data dari SPT yang diterima, kedalam *server* pusat yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau kedalam *server* lokal melalui aplikasi perekaman lokal. Untuk keterangan lebih lengkapnya mengenai segala aktivitas yang penulis lakukan, berikut ini rekaman aktivitas yang penulis lakukan selama bertugas pada divisi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

**Tabel III.2**  
**Aktivitas Magang Pada Divisi Pengolahan Data dan Informasi**  
**KPP Pratama Karanganyar**

Hari/ Tanggal	Lama Magang			Uraian Pekerjaan
	Datang	Istirahat	Pulang	
Senin, 1 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Perkenalan, Pembagian Tugas, Perekaman SPT
Selasa, 2 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Rabu, 3 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Kamis, 4 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Jumat, 5 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Senin, 8 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Selasa, 9 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa

*Lanjutan tabel III.2*

Rabu, 10 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Kamis, 11 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Jumat, 12 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Senin, 15 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Selasa, 16 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Rabu, 17 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Kamis, 18 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Jumat, 19 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Senin, 22 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Selasa, 23 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Rabu, 24 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Penyortiran SPT dan Rekap SPT
Kamis, 25 Feb 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Senin, 1 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Selasa, 2 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Rabu, 3 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Kamis, 4 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Jumat, 5 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Senin, 8 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman Tanda Terima Drop Box
Selasa, 9 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman Tanda Terima Drop Box
Rabu, 10 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman Tanda Terima Drop Box
Kamis, 11 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman Tanda Terima Drop Box
Jumat, 12 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman Tanda Terima Drop Box
Senin, 15 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman Tanda Terima Drop Box

*Lanjutan tabel III.2*

Rabu, 17 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Kamis, 18 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Jumat, 19 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Senin, 22 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Selasa, 23 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Rabu, 24 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Kamis, 25 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Jumat, 26 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Senin, 29 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman SPT Masa
Selasa, 30 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman Tanda Terima Drop Box
Rabu, 31 Maret 2010	07.30 WIB	12.00-13.00 WIB	15.00 WIB	Melakukan Perekaman Tanda Terima Drop Box, Memberikan Tanda Terima Drop Box Pada SPT yang Masuk

*Sumber: Data diolah*

### **C. Pembahasan masalah**

#### **1. Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar merupakan salah satu Instansi di bidang perpajakan, yang peranannya cukup besar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak khususnya di daerah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar merupakan kantor yang khusus untuk melayani Wajib Pajak dan memberikan informasi di bidang perpajakan kepada

masyarakat khususnya di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.

- a. Dalam peranannya mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar memberikan berbagai program pelayanan di bidang perpajakan. Program pelayanan tersebut antara lain:

- 1) Penyuluhan

KPP Pratama Karanganyar melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Penyuluhan dilakukan di Kantor Kecamatan di wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar. Selain peraturan terbaru, dalam penyuluhan juga disampaikan berbagai hal seputar masalah perpajakan yang dihadapi oleh Wajib Pajak. Penyuluhan sangat penting dilakukan karena KPP Pratama Karanganyar langsung dapat bertatap muka dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak.

- 2) Publikasi

Publikasi merupakan salah satu pelayanan yang diberikan KPP Pratama Karanganyar. Tujuannya tidak lain guna selalu menghimbau masyarakat agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Publikasi dengan sarana media massa elektronik, seperti TV dan Radio telah sering kali dilakukan. KPP Pratama Karanganyar menggunakan media ini pada saat waktu-waktu penting seperti batas akhir

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Tujuannya agar Wajib Pajak tidak terlambat menyampaikan SPT.

Selain itu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar juga disediakan berbagai macam brosur tentang perpajakan yang dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat memiliki brosur-brosur tersebut tanpa dipungut biaya. Guna menarik perhatian Wajib Pajak, KPP Pratama Karanganyar pernah menyebarkan souvenir bagi pengguna jalan di sepanjang Jalan Raya Lawu Karanganyar. Ini dilakukan pada setiap bulan Maret. Selain menarik perhatian, kegiatan ini dilakukan untuk terus menghimbau bahwa batas akhir penyampaian SPT Tahunan sudah semakin dekat.

3) MTU (*Mobile Tax Unit*)

Pelayanan MTU berwujud sebuah mobil yang tiap hari bergerak untuk memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Pelayanan MTU menggunakan prinsip jemput bola. Maksudnya fiskus yang mendatangi Wajib Pajak.

4) Drop Box

*Drop Box* adalah sebuah kotak (*Box*) yang merupakan tempat Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh. *Drop Box* umumnya terdapat di tempat-tempat keramaian, misalnya di mall atau gedung perkantoran. Drop Box digunakan untuk menyampaikan SPT Tahunan Pasal 21

(1721), SPT Tahunan PPh Badan (1771 & 1771 S), SPT Tahunan Orang Pribadi (1770, 1770S & 1770 SS) dan SPT Tahunan Pembetulan.

KPP Pratama Karanganyar menyebarkan *Drop Box* ke seluruh Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya. *Drop Box* ditempatkan di setiap Kantor Kecamatan di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Selain di Kantor Kecamatan, *Drop Box* juga ditempatkan di Swalayan Luwes Palur, Pasar Tawangmangu dan Kantor Polisi. *Drop Box* ditempatkan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB. Selama masa *Drop Box*, KPP Pratama Karanganyar menambah jam kerja pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 dan 27 Maret 2010. Pada hari tersebut jam kerja mulai pukul 08.30-12.00 WIB. Dan pada puncak *Drop Box* yaitu tanggal 31 Maret 2010 jam kerja dimulai pukul 07.30-19.00 WIB.

5) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi dengan sistem yang melekat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam memberikan pelayanan perpajakan. (DJP, Buku Panduan Pelayanan)

Jadwal pelayanan TPT di KPP Pratama Karanganyar adalah pukul 08.00 – 16.30 WIB. Ketentuan jam kantor mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk Departemen

Keuangan, pembatasan waktu pelayanan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan persiapan agar pelayanan publik dapat diberikan dengan sebaik-baiknya dan administrasi TPT dapat terjaga kerapian administrasi dan keteraturannya. Pada jam istirahat (termasuk hari Jumat), TPT tetap melayani penerimaan surat dan atau laporan sehingga tidak dibenarkan TPT dalam keadaan kosong, petugas bergantian beristirahat (pengaturannya diserahkan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak).

Sebelum jam pelayanan, seluruh petugas TPT yang bertugas pada hari tersebut wajib menata administrasi TPT, seluruh formulir cukup tersedia, komputer dan sarana dapat digunakan dengan baik untuk seluruh aktivitas pelayanan pada hari tersebut. Setelah jam pelayanan, seluruh petugas TPT menata kembali administrasi di TPT.

Jenis pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu yaitu:

- a. Pemberian Informasi Perpajakan.
- b. Penerimaan Surat-Surat Permohonan dari Wajib Pajak dan Surat Lainnya.
- c. Penerimaan Pelaporan dan Surat Penundaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- d. Penerimaan SPT Masa PPh dan PPN.
- e. Pembuatan NPWP/ NPPKP.

- f. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  - g. Pelayanan Lainnya.
- 6) E-SPT (*e-Filling*)

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan melalui media internet (*e-Filling*). Cara ini terbilang masih baru di KPP Pratama Karanganyar, dan berlaku mulai tahun 2009. Wajib Pajak yang ingin menggunakan *e-Filling* harus mengajukan permohonan e-FIN. Persyaratan untuk mengajukan permohonan secara tertulis dengan formulir yang disediakan pada lampiran peraturan Dirjen Pajak Nomor Kep-05//PJ/2005 dan dilampiri fotokopi kartu NPWP serta melampirkan surat pengukuhan PKP jika PKP. E-FIN adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak atas pengajuan permohonan untuk menyampaikan SPT secara elektronik oleh KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar. Setelah mendapatkan e-FIN Wajib Pajak harus mendaftar di salah satu perusahaan penyedia jasa (ASP) yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

Keunggulan *e-Filling* atas penyampaian SPT secara manual diakui karena menghemat waktu, tenaga, biaya, dan kenyamanan kerja. Mengingat semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar maka penyampaian SPT secara manual dinilai tidak mungkin lagi ditangani oleh pihak



otoritas pajak mengingat besarnya bobot penyimpanan dokumen, kesulitan pencarian dan penelitian. Untuk mengoptimalkan *e-Filling* maka KPP Pratama Karanganyar berupaya mengenalkan *e-Filling* sejak dini kepada Wajib Pajak. *E-Filling* dinilai dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT karena dengan *E-Filling* Wajib Pajak tidak lagi terhambat oleh jarak antara KPP Pratama Karanganyar dengan rumah atau tempat kerja Wajib Pajak. *E-Filling* dapat disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari selama 24 jam.

7) Call Center

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar memberikan pelayanan call center bagi masyarakat yang mempunyai keluhan tentang kewajiban perpajakannya maupun keluhan-keluhan lainnya yang menyangkut KPP Pratama Karanganyar. Adapun nomor yang bisa dihubungi ialah (0271) 6491281 dan 6491282.

b. Tujuan berbagai pelayanan yang diberikan tersebut adalah:

- 1) Mempermudah Wajib Pajak dalam bidang perpajakan.
- 2) Modernisasi administrasi perpajakan.
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya.
- 4) Memudahkan pengawasan dan pelaksanaan tugas.

- 5) Untuk terus meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Indikasi tingkat kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak (WP):
- 1) Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
  - 2) Semakin banyak Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melaporkan pajaknya.
  - 3) Bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru.
  - 4) Jumlah Wajib Pajak yang datang semakin banyak bila diadakan penyuluhan tentang perpajakan.
  - 5) Tertib membayar pajak.

Untuk menilai kesadaran Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, penulis menggunakan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Data yang diperoleh merupakan data selama periode 2007-2009. Penilaian terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, akan disajikan dalam bentuk analisis persentase sebagai berikut:

a. Analisis Persentase

Analisis persentase adalah analisis yang membandingkan antara dua buah komponen sehingga didapat suatu keputusan apakah objek tersebut mengalami kenaikan atau penurunan yang besar kecilnya dinyatakan dalam persentase.

b. Analisis Persentase Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif

Wajib Pajak Terdaftar dalam KPP Pratama Karanganyar dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Wajib Pajak Efektif

Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau SPT Tahunan sebagaimana mestinya.

2) Wajib Pajak non Efektif

Wajib Pajak non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau SPT Tahunan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/ PJ.8/ 1988 tanggal 2 Oktober 1988 Wajib Pajak non Efektif adalah:

- Wajib Pajak yang berturut-turut selama 2 (dua) tahun tidak memasukkan SPT PPh.
- Wajib Pajak yang sudah meninggal dunia/ bubar, tetapi belum ada surat keterangan resminya.
- Wajib Pajak tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah diusahakan pencariannya oleh dinas luar.
- Wajib Pajak yang secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usaha.

Dari uraian tersebut secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

<u>SPT Tahunan</u>	<u>SPT Masa</u>	<u>Keterangan</u>
Ada	Ada	WP Efektif
Ada	Tidak Ada	WP Efektif
Tidak Ada	Ada	WP Efektif
Tidak Ada	Tidak Ada	WP non Efektif *

\*) tidak memasukkan SPT berturut-turut selama 2 (dua) tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan

Dengan adanya berbagai program pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Karanganyar untuk memudahkan Wajib Pajak, tentunya hal ini juga akan ikut meningkatkan jumlah Wajib Pajak. KPP Pratama Karanganyar dalam peranannya untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar. Berikut ini akan disajikan analisis persentase antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif selama periode tahun 2007-2009.

**Tabel III.3**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif di KPP Pratama Karanganyar**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar</b>	<b>WPOP Terdaftar</b>	<b>WPOP Efektif</b>	<b>Persentase WPOP Efektif</b>
2007	29.764	24.569	24.254	98,7%
2008	36.352	30.815	30.517	99,0%
2009	45.251	41.720	-	-

*Sumber: Seksi PDI/ SIDJP*

Perhitungan persentase antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif adalah sebagai berikut:

- Tahun 2007:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif 2007}}{\text{Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar 2007}} \times 100\% \\ &= \frac{24.254}{24.569} \times 100\% \\ &= \mathbf{98,7\%} \end{aligned}$$

- Tahun 2008:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif 2008}}{\text{Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar 2008}} \times 100\% \\ &= \frac{30.517}{30.815} \times 100\% \\ &= \mathbf{99,0\%} \end{aligned}$$

- Tahun 2009:

Pada tahun 2009 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif tidak diketahui karena keterbatasan data yang diperoleh. Sehingga perhitungan persentase antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif tidak dapat dilakukan. Namun dengan melihat tabel III.3, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar terus mengalami peningkatan selama periode 2007-2009. Pada tahun 2007 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar adalah 24.569, dan dari jumlah tersebut sebanyak 24.254 merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 98,7%. Tahun 2008 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar naik menjadi 30.815 dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif sebesar 30.517 dengan tingkat efektifitas sebesar 99,0%. Di tahun 2009 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 41.720, namun Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif tahun 2009 tidak dapat diketahui karena terbatasnya data yang diperoleh.

c. Analisis Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar Periode 2007-2009

Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif setiap tahunnya di KPP Pratama Karanganyar periode 2007-2009 berdampak pula pada realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar khususnya penerimaan PPh Pasal 21 yang semakin meningkat pula. Untuk mengetahui persentase kenaikan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Karanganyar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III.4**  
**Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama**  
**Karanganyar Periode 2007-2009**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2007	-	-
2008	Rp 49.302.511.192,00	-
2009	Rp 60.897.910.999,00	23,5%

*Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi*

Perhitungan persentase kenaikan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar adalah sebagai berikut:

▪ Tahun 2007:

Persentase kenaikan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2007 di KPP Pratama Karanganyar tidak bisa dihitung dan diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2007 KPP Pratama Karanganyar baru resmi berdiri.

▪ Tahun 2008:

Persentase kenaikan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2008 di KPP Pratama Karanganyar tidak dapat diketahui karena terbatasnya data yang diperoleh khususnya data tahun 2007 sebagai data pembanding. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 adalah Rp 49.302.511.192,00.

▪ Tahun 2009:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Penerimaan Pajak 2009} - \text{Penerimaan Pajak 2008}}{\text{Penerimaan Pajak 2008}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 60.897.910.999,00} - \text{Rp 49.302.511.192,00}}{\text{Rp 49.302.511.192,00}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 11.595.399.807,00}}{\text{Rp 49.302.511.192,00}} \times 100\% = \mathbf{23,5\%}
 \end{aligned}$$

Kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2007 di KPP Pratama Karanganyar tidak dapat diketahui karena minimnya data yang diperoleh. Untuk tahun 2008 penerimaan PPh Pasal 21 yaitu sebesar Rp 49.302.511.192,00. Tahun 2009 penerimaan PPh Pasal 21 tumbuh 23,5% dari penerimaan PPh Pasal 21 tahun 2008. Pada dasarnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat karena memang KPP Pratama Karanganyar menargetkan penerimaan pajak setiap tahun harus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Minimal target adalah 100% penerimaan tahun sebelumnya harus tercapai kembali.

## **2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh KPP Pratama Karanganyar dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen**

Dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, ditemukan berbagai hambatan dalam proses tersebut. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya kerjasama dengan Instansi diluar Direktorat Jenderal Pajak (pihak ketiga) guna memperoleh data mengenai potensi Wajib Pajak baru.
- b. Sistem *Self Assessment* dianggap menguntungkan Wajib Pajak yang belum terdaftar, sehingga sebagian besar Wajib Pajak enggan untuk mendaftarkan dirinya.



- c. Masih rendahnya informasi yang diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara.
- d. Masyarakat beranggapan bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak tidak bisa dinikmati secara langsung.
- e. Masyarakat beranggapan tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan uang pajak.
- f. Kurangnya kesadaran, kepatuhan dan kepedulian Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

### **3. Usaha Yang Dilakukan KPP Pratama Karanganyar Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Khususnya di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen Terhadap Kewajiban Perpajakannya**

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak antara lain:

#### **a. Ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak**

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi perpajakan. Pencarian data merupakan kegiatan mencari sumber-sumber yang dapat memberikan data untuk digunakan sebagai dasar ekstensifikasi Wajib Pajak. Sumber data bisa diperoleh dari:

1) Instansi Internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Instansi internal Direktorat Jenderal Pajak biasa disebut alat keterangan. Data mengenai calon Wajib Pajak diperoleh dari pihak dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sendiri atau fiskus. Mereka memperoleh data melalui pengamatan.

2) Instansi Diluar Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama, melakukan kerjasama dengan instansi diluar Direktorat Jenderal Pajak dimana Instansi luar tersebut berada di wilayah administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Misalnya bekerjasama dengan Pemerintah Kota setempat, Instansi lain seperti Telkom dan PLN guna mengetahui tagihan rekening tiap calon Wajib Pajak. Dengan tagihan listrik atau telepon yang tinggi tentunya orang tersebut berpotensi untuk menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

3) Penyisiran (*Canvassing*)

Petugas pajak melakukan penyisiran ke jalan-jalan utama, pusat perdagangan, *real estate* atau secara *door to door*, sehingga petugas pajak lebih mengenali calon Wajib Pajak di daerah tersebut dan mendaftar siapa saja yang berpotensi menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 4) *Sunset Policy* Tahun 2008

*Sunset Policy* merupakan salah satu cara ekstensifikasi Wajib Pajak. *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang hanya berlaku di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Yang dipentingkan dalam kebijakan *sunset policy* adalah agar seluruh rakyat Indonesia yang sudah layak pajak masuk ke dalam sistem data perpajakan.

Untuk mengetahui pengaruh *sunset policy* terhadap terwujudnya masyarakat sadar dan peduli pajak khususnya di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, berikut akan ditampilkan data mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar pada saat sebelum sunset dan setelah *sunset policy* dilaksanakan.

**Tabel III.5**  
**Jumlah WPOP Terdaftar**  
**Pra *Sunset Policy* dan Setelah *Sunset Policy* Dilaksanakan**  
**di KPP Pratama Karanganyar**

WP Terdaftar	2007 (pra sunset)	2008 (sunset)	Selisih	Persentase
Orang Pribadi	24.569	30.815	6.246	25,4%

*Sumber: Data diolah*

Dari tabel III.5 diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar pada tahun 2008 yaitu setelah dilaksanakan kebijakan *sunset policy* mengalami kenaikan sebesar 6.246 WPOP dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar tahun 2007. Jumlah WPOP Terdaftar tahun 2007 sebesar 24.569 dan pada tahun 2008 naik sebesar 25,4% menjadi 30.815. Perhitungan kenaikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{WPOP Terdaftar 2008} - \text{WPOP Terdaftar 2007}}{\text{WPOP Terdaftar 2007}} \times 100\% \\ &= \frac{30.815 - 24.569}{24.569} \times 100\% \\ &= \frac{6.246}{24.569} \times 100\% \\ &= \mathbf{25,4\%} \end{aligned}$$

Dengan demikian pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tentang *sunset policy* di KPP Pratama Karanganyar sangat efektif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar.

b. Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direkur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya meliputi pemeriksaan Wajib Pajak yang

telah diketahui alamatnya dan telah dikirim surat himbauan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c. Penggunaan Teknologi Informasi

Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak. Penggunaan internet dalam perpajakan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian Wajib Pajak serta menambah pengetahuan akan pentingnya pajak bagi pembangunan negeri ini.

d. Menggunakan Jalur Periklanan

Usaha ini dilakukan dengan pemasangan *billboard*, spanduk, reklame, serta publikasi di media massa. Baik itu media massa cetak maupun media elektronik.

e. Memberikan Penjelasan Kepada Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak

Memberi penjelasan kepada Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak mengenai pentingnya ber-NPWP khususnya bagi Orang Pribadi yang penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu juga diberitahukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja hanya diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

saja, tidak ada kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa kecuali memperoleh penghasilan lain.

f. Memberikan Penyuluhan Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Penyuluhan adalah kegiatan untuk memberikan motivasi tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk membiayai pembangunan nasional. Penyuluhan secara langsung dilakukan dengan cara seminar dan *Talk Show*. Sedangkan penyuluhan secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan *pamflet*, brosur, dan buku-buku panduan tentang perpajakan.

g. AR (*Account Representative*)

*Account Representative* (AR) adalah petugas yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah melaksanakan Sistem Administrasi Modern. *Account Representative* (AR) berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak (WP). Setiap *Account Representative* (AR) mempunyai beberapa Wajib Pajak yang harus diawasi.

Penugasan pelayanan oleh *Account Representative* (AR) dilakukan berdasarkan jenis usaha sehingga meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan produktivitas kerja karena pelaksanaan pekerjaan lebih terfokus. AR memiliki pemahaman

tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan. Untuk itu AR secara berkala mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai nara sumber.

*Account Representative* (AR) juga dilatih agar menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Seorang *Account Representative* (AR) memiliki akses terhadap rekening Wajib Pajak (*tax payer account*) secara *on-line*. Selain itu Wajib Pajak dapat dengan mudah menghubungi *Account Representative* (AR)-nya baik secara langsung datang ke KPP Pratama Karanganyar maupun menggunakan telepon dan *email*.

Tanggung jawab *Account Representative* (AR) adalah:

- 1) Menangani sejumlah kecil Wajib Pajak (WP) tertentu.
- 2) Bertanggung jawab untuk menginformasikan semua perubahan peraturan.
- 3) Merespon pertanyaan atau permintaan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban atau hak perpajakan.
- 4) Memastikan bahwa Wajib Pajak memperoleh hak-haknya secara transparan.

Tugas *Account Representative* (AR) adalah:

- 1) Tugas *Account Representative* (AR) yang berhubungan dengan Wajib Pajak (WP) yaitu:
  - Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP).

- Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak (WP).
- Melaksanakan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan kepada Wajib Pajak (WP).
- Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak (WP).
- Membuat dan memutakhirkan profil Wajib Pajak (WP).
- Membuat Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- Membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25.
- Membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak (WP) dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data Wajib Pajak (WP).
- Membuat Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak (tidak termasuk STP bunga penagihan) Pasal 7, Pasal 8 (2), Pasal 9 (2a) dan Pasal 14 (3).
- Membuat konsep Nota Penghitungan dalam rangka penerbitan SKPKB/SKPKBT tanpa prosedur pemeriksaan.
- Melaksanakan proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP.



- Membuat konsep usulan Wajib Pajak (WP) / PKP Fiktif dan Wajib Pajak (WP) Patuh.
- Membuat konsep perhitungan Lebih Bayar (LB).
- Melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitan Bukti Pbk berdasarkan permohonan Wajib Pajak (WP).
- Melaksanakan penelitian Bukti Pemindahbukuan secara jabatan.
- Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara (SKPPS).
- Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN.
- Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa.
- Melakukan penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai, Surat Ijin Pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi dan memproses pencabutan ijin penggunaannya.

- Membuka segel mesin teraan dan membuat Berita Acara-nya.
- Melaksanakan pengalihan saldo bea meterai dengan mesin teraan, pengalihan saldo bea meterai dengan teknologi percetakan dan dengan sistem komputerisasi.
- Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (WP).
- Menyusun konsep uraian pelaksanaan dan konsep evaluasi hasil Putusan Banding/Peninjauan Kembali.
- Membuat konsep laporan penelitian Ijin Perubahan Tahun Buku dan Metode Pembukuan Pertama.
- Membuat konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

2) Tugas *Account Representative* (AR) yang berhubungan dengan atasannya secara langsung yaitu:

- Membuat konsep rencana kerja.
- Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan.
- Membuat konsep laporan berkala seksi.

*Account Representative* (AR) akan memberikan informasi mengenai:

- 1) Rekening Wajib Pajak (WP) untuk segala jenis pajak.
- 2) Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi.

- 3) Interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan.
- 4) Perubahan data identitas Wajib Pajak.
- 5) Tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak.
- 6) Kemajuan proses keberatan dan banding.
- 7) Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada BAB.III mengenai peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar memberikan berbagai macam fasilitas pelayanan bagi Wajib Pajak yang diantaranya adalah melakukan penyuluhan, seminar, sosialisasi tentang perpajakan, dan publikasi yang luas di media massa cetak maupun elektronik. Selain itu KPP Pratama Karanganyar juga memberikan berbagai fasilitas lainnya guna memudahkan Wajib Pajak seperti *Drop Box*, *Mobile Tax Unit*, *Account Representative*, Tempat Pelayanan Terpadu, *Call Center*, dan E-SPT (*E-Filling*).
2. Tujuan KPP Pratama Karanganyar memberikan berbagai fasilitas tersebut ialah untuk mempermudah Wajib Pajak itu sendiri guna mengurus kewajiban pajaknya serta bagi KPP Pratama Karanganyar sendiri hal ini merupakan peningkatan mutu pelayanan, mempermudah pelaksanaan tugas dan meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Karanganyar.

3. Dengan berbagai fasilitas yang telah diberikan oleh KPP Pratama Karanganyar dalam pelayanan kepada Wajib Pajak, telah dapat dilihat hasilnya bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen pelan-pelan mulai meningkat. Ini diindikasikan dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif di KPP Pratama Karanganyar setiap tahunnya mengalami kenaikan. Indikasi lainnya yaitu penerimaan pajak periode 2007-2009 khususnya penerimaan PPh Pasal 21 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.
4. Pada tahun 2007 jumlah WPOP Terdaftar adalah 24.569, dan dari jumlah tersebut sebanyak 24.254 merupakan WPOP Efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 98,7%. Tahun 2008 jumlah WPOP Terdaftar naik menjadi 30.815 dan 30.517 diantaranya merupakan WPOP Efektif dengan tingkat efektifitas 99,0%. Di tahun 2009 jumlah WPOP Terdaftar juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 41.720, namun jumlah WPOP Efektif tahun 2009 tidak dapat diketahui karena terbatasnya data yang diperoleh.
5. Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif selama periode 2007-2009 juga berpengaruh pada penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar. Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar periode 2007-2009 mengalami peningkatan.
6. KPP Pratama Karanganyar sangat efektif menjalankan peranannya dalam upaya mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak. Hal ini

terbukti dengan peningkatan jumlah WPOP Terdaftar dan jumlah WPOP Efektif.

7. Hambatan terbesar KPP Pratama Karanganyar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen ialah pandangan negatif masyarakat tentang pajak. Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang arti penting pajak bagi negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk membiayai pembangunan nasional. Ini perlu ditanamkan kuat di hati setiap orang agar terwujud masyarakat yang sadar dan peduli pajak, khususnya masyarakat Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen

## **B. Saran**

Agar peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar lebih baik dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, berikut ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan antara lain:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar harus lebih meningkatkan kinerja dan disiplin aparat pajaknya.
2. Memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat memberikan hasil kerja yang maksimal.

4. Terus meningkatkan keterampilan aparat pajaknya dalam memberikan pelayanan perpajakan sehingga tercipta suasana yang nyaman bagi Wajib Pajak dan memudahkan Wajib Pajak dalam urusan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
5. Lebih sering melakukan sosialisasi pajak agar masyarakat menjadi sadar tentang peran pajak bagi pembangunan nasional.
6. Selama proses penyusunan Tugas Akhir ini terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian mengenai peranan KPP Pratama Karanganyar dalam mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen antara lain:
  - a. Keterbatasan kemampuan penulis dalam menganalisis data.
  - b. Keterbatasan data yang bisa diperoleh penulis dalam penelitian guna menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Buku Panduan Pelayanan*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Buku PPh Persandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Suandy, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)